

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata menjadi salah satu bidang yang menghasilkan devisa bagi negara, hal inilah yang membuat pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan sektor pariwisata salah satunya melalui langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan sektor pariwisata. Perkembangan bidang pariwisata sekarang mengalami perubahan arah dari sisi *mass tourism* menjadi *alternative tourism*. Pariwisata massal atau *mass tourism* sendiri berarti kepariwisataan yang disediakan untuk dikunjungi dalam jumlah banyak dan memungkinkan untuk dikunjungi setiap tahunnya. Berbeda dengan *mass tourism*, Pariwisata alternatif atau *alternative tourism* diartikan sebagai suatu kawasan wisata yang dikembangkan dengan orientasi pada pemeliharaan atau pelestarian lingkungan alam dan budaya, dan dikunjungi oleh wisatawan dengan jumlah yang relatif terbatas. Pergeseran tersebut juga berdampak pada perubahan orientasi pasar dimana saat ini lebih ke arah penghayatan dan penghargaan pada sisi kelestarian alam, lingkungan, dan budaya dengan menerapkan pariwisata yang berbasis alternatif (Sugiama, 2011).

Saat ini, mulai terjadi perubahan pemikiran terutama setelah melihat para wisatawan yang semakin matang, berpengalaman, serta teredukasi dalam melihat pentingnya pengembangan obyek wisata yang menekankan sisi kelestarian lingkungan serta mendukung aspek pemberdayaan masyarakat lokal (Rizkianto dan Topowijono, 2018). Hal itu juga sebagai bentuk dukungan konservasi alam

dan menjadi kritikan pengembangan pariwisata massal yang kebanyakan lebih condong pada mencari keuntungan semata dibandingkan meningkatkan sisi pembangunan yang keberlanjutan dan kelestarian ekosistem. Pelestarian lingkungan maupun pemberdayaan masyarakat sekitar dapat dilakukan dengan menggali setiap potensi sumber daya lingkungan dan diikuti oleh kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal. Kenyataannya, masih ditemukan permasalahan umum dalam pengembangan obyek wisata seperti tidak dioptimalkannya peranan masyarakat lokal sehingga mereka merasa kurang bangga akan pengembangan pariwisata yang ada di wilayahnya tersebut. Masyarakat yang tidak memperoleh keuntungan atas kegiatan kepariwisataan di sekitar mereka juga menjadi permasalahan umum lainnya yang kerap ditemui dalam kurun waktu belakangan ini. Berbagai masalah tersebut pada intinya menjadi salah satu bentuk dari kurang dipahaminya pengembangan pariwisata yang memaksimalkan peran masyarakat secara langsung untuk terlibat ke dalam kegiatan pengembangan pariwisata di desa mereka (Herdiana, 2019).

Menurut Prayitno (2013: 60-61) kawasan yang memiliki potensi wisata dapat menjadi salah satu sarana pembangunan ekonomi masyarakat sekitar melalui pembangunan usaha-usaha mulai dari *homestay*, restoran, oleh-oleh atau cinderamata, dan penyewaan berbagai atraksi wisata yang apabila dikembangkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut. Pariwisata selain sebagai sumber pendapatan devisa negara juga menjadi sarana untuk membuka lapangan pekerjaan, penggerak pembangunan daerah, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga sarana untuk menjaga kelestarian budaya dan

kualitas lingkungan hidup. Baiquni dan Wardiyanto (2011:15) mengungkapkan prioritas utama dari pariwisata adalah membentuk manusianya, utamanya masyarakat sekitar dan masyarakat yang berhubungan dengan para pengunjung supaya bisa menciptakan keadilan serta kerja sama, termasuk rasa menghargai, dan saling memperuntungkan kehidupan.

Usaha yang dapat dicapai untuk mendorong kesejahteraan masyarakat tersebut salah satunya dengan mengoptimalkan sisi pemberdayaan masyarakat. Pengembangan pada sektor pariwisata sekarang juga mempertimbangkan aspek pemberdayaan masyarakat, utamanya masyarakat yang ada di sekitar obyek wisata. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan pengelolaan sumber daya yang berpotensi baik di mata wisatawan maupun para investor. Berjalan tidaknya sebuah obyek wisata sangat bergantung pada bagaimana pemberdayaan tersebut berlangsung. Perlu adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan obyek wisata. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah dalam pasal 6 ayat 41 dijelaskan pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai peranserta warga negara untuk menyalurkan aspirasi, ide, atau kepentingan mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu berarti, setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta di penyelenggaraan pemerintahan daerah lewat pengembangan potensi warga lokal salah satunya dengan pengembangan obyek wisata pada daerah mereka (Widyastuti, 2022).

Adanya pariwisata berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat salah satunya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes). Desa berhak menciptakan suatu badan usaha yang menyesuaikan kebutuhan dan sumber daya yang ada di desa tersebut. Harapannya BUMDes dapat mendorong dan menjadi penggerak sisi perekonomian dan dikelola secara langsung masyarakat desa tersebut.

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu langkah yang bertujuan melibatkan serta memberdayakan komunitas lokal pada seluruh aspek industri pariwisata, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai proses evaluasinya. Pemberdayaan masyarakat tidak memberikan manfaat dari segi ekonomi saja namun juga mempromosikan keberlanjutan lingkungan maupun budaya dan yang paling utama menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata tidak hanya memberikan akses kepada industri pariwisata namun juga memberikan masyarakat kendala dan kemandirian untuk memanfaatkan potensi pariwisata yang ada di wilayah mereka.

Sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar dikenal sebagai Bumi Intanpari yang merupakan akronim dari industri, pertanian, dan pariwisata. Hal tersebut telah tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2032 Kabupaten Karanganyar diarahkan sebagai sentra pengembangan industri UMKM, produk agrikultur, dan menjadi salah satu daerah utama yang memiliki keanekaragaman pariwisata untuk dikunjungi wisatawan di Jawa Tengah maupun nasional.

Kecamatan Ngargoyoso menjadi basis kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 6 Tahun 2016, Kecamatan Ngargoyoso menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten atau KSPK Kabupaten Karanganyar. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten atau KSPK ini menjadi wilayah yang memiliki fungsi utama pengembangan pariwisata maupun potensi sumber daya daerah yang berpengaruh penting terhadap banyak aspek mulai dari aspek perekonomian, aspek lingkungan sosial budaya, aspek pemberdayaan sumber daya alam, aspek lingkungan hidup, dan aspek pertahanan dan keamanan. Desa Puntukrejo terletak di Kecamatan Ngargoyoso. Desa ini memiliki banyak potensi di dalamnya, mulai dari potensi alam yang cocok untuk bidang pertanian dan kawasan wisata, udara yang masih sejuk, dan bentang alam yang bervariasi dan masih asri menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk mengunjunginya. Hal ini juga dapat mendorong masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan desanya salah satunya melalui sektor pariwisata dengan mengembangkan kearifan lokal yang ada di dalamnya.

The Lawu Fresh merupakan sebuah agrowisata yang terletak di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Agrowisata ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Puntukrejo yang bernama BUMDes Kridha Jaya. BUMDes ini berdiri pada tahun 2018 dan berfokus pada unit usaha parkir, usaha kuliner, dan usaha agrowisata. Saat ini, BUMDES Kridha Jaya juga tengah mengembangkan usaha kuliner. Pendirian BUMDES ini sendiri

sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 mengenai Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.

Kenyataannya dalam perkembangan obyek wisata tersebut ataupun di kawasan sekitarnya, masih ditemukan beberapa permasalahan seperti dalam penelitian yang dilakukan Khoiruddin, dkk (2021) berjudul “Optimasi Pariwisata Kreatif Berbasis Integrasi Potensi Lokal Desa Puntukrejo untuk Mewujudkan *Sustainable Development Goals* Desa”. Pada penelitian tersebut dipaparkan beberapa permasalahan seperti kurangnya sisi inovasi dan kreativitas yang berdampak pada obyek wisata *The Lawu Fresh* tidak memiliki pembeda dengan obyek wisata yang lainnya. Selain itu sentra UMKM lokal pada pemasaran produk UMKM juga masih konvensional serta belum memanfaatkan perkembangan teknologi. Hal ini menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan ke *The Lawu Fresh* masih cukup rendah. Jumlah kunjungan wisatawan di *The Lawu Fresh* tersebut tidak sebanyak obyek agrowisata sejenis yang ada di Desa Puntukrejo, salah satunya adalah obyek Agrowisata Kampung Karet.

Tabel 1.1 Statistik Jumlah Pengunjung Agrowisata di Desa Puntukrejo Tahun 2019 - 2021

No	Agrowisata	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	<i>The Lawu Fresh</i>	6.300	3.301	5.403
2.	Agrowisata Kampung Karet	16.694	14.897	44.102

Sumber: Open Data Kabupaten Karanganyar (2019, 2020, 2021)

Dari segi kualitas sumber daya manusia juga masih rendah apabila dilihat dari usaha UMKM masyarakat yang masih belum berkembang dalam segi kemasan yang masih sederhana dan jaringan pemasaran oleh-oleh khas daerah masih

terbatas menyebabkan *output* usaha UMKM juga belum berlangsung dengan maksimal. Hal tersebut didukung dari Tim Hibah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 2022 yang melakukan sosialisasi ke masyarakat diikuti dengan pendampingan legalitas produk usaha di Desa Puntukrejo. Kegiatan ini mencakup pada sosialisasi pentingnya aspek legalitas bagi produk usaha dan kegiatan pendampingan untuk memproses legalitas produk usaha mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Hak Kekayaan Intelektual utamanya merk.

Gambar 1.1 Sosialisasi dan Kegiatan Pendampingan Legalitas Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Puntukrejo



Sumber: Suara Merdeka Solo (2022)

Penelitian lainnya yang ditulis oleh Musyawaroh, dkk (2021) berjudul “Strategi Penataan Lahan BUMDes Puntukrejo Ngargoyoso Karanganyar Sebuah Penerapan Konsep Agrowisata” ditemukan beberapa permasalahan seperti luasnya lahan BUMDes Puntukrejo tersebut tidak diikuti dengan pemanfaatan dan pengoptimalan yang baik. Sebagian lahan tersebut dimanfaatkan sebagai lokasi *The Lawu Fresh* namun belum optimal secara keseluruhan hal ini karena belum adanya penataan secara terencana serta terintegrasi untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada.

Gambar 1.2 Lahan BUMDes Puntukrejo, Lokasi *The Lawu Fresh*



Sumber: Google Earth, 2021 (dalam Leny Pramesti, dkk. 2021)

Terakhir, dalam penelitian Pramesti, dkk (2021) berjudul “Identifikasi Potensi dan Permasalahan di Lahan BUMDes Desa Puntukrejo Kabupaten Karanganyar” ditemukan permasalahan seperti belum optimalnya pengembangan UMKM mengingat belum adanya fasilitas kios oleh-oleh.

Secara umum kondisi eksisting atau kondisi yang ada dan terjadi pada obyek wisata *The Lawu Fresh* saat ini secara keseluruhan hampir sama dengan permasalahan yang telah dipaparkan pada penelitian.

1. *The Lawu Fresh* masih belum sepenuhnya memiliki diferensiasi atau perbedaan dengan obyek wisata yang lainnya.
2. Obyek wisata *The Lawu Fresh* telah membudidayakan tanaman hias salah satunya Miana (*Coleous Scutellarioides*) untuk menarik wisatawan, namun pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal. Hal ini yang melandasi Fakhrol Fathoni, dkk (2022) mengembangkan tanaman tersebut menjadi bahan dasar pembuatan sirup “*Pink Fresh*” yang dapat dijadikan sebagai produk unggulan daerah.

Gambar 1.3 Tanaman Miana di *The Lawu Fresh*



Sumber: Google Maps, *The Lawu Fresh* (2022)

3. Potensi UMKM di sekitar obyek wisata *The Lawu Fresh* ini masih belum sepenuhnya optimal dilihat dari sisi pemasaran dan *branding* kemasan produk juga masih sangat sederhana. Pemasaran yang konvensional dan belum memanfaatkan teknologi tersebut berdampak pada tingkat jumlah pengunjung. Pada tahun 2021 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) membuat program integrasi pariwisata dan UMKM yang bertajuk *UMKM Edutour*. Program ini mengandalkan potensi Jeep Wisata dengan UMKM melalui pengadaan pelatihan bisnis dan pemasaran di era digital 4.0 dengan mengundang masyarakat yang memiliki usaha di Desa Puntukrejo diikuti pembuatan video kreatif.
4. Permasalahan lain pada pengembangan UMKM, yakni kurangnya sisi inovasi dan kreativitas untuk menggali potensi yang ada di obyek wisata *The Lawu Fresh*. Hal tersebut mendorong Tim pengabdian Sekolah Vokasi (SV) Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 2022 melakukan

kolaborasi bersama STIKES Nasional untuk mengembangkan potensi ubi ungu sebagai produk kosmetik.

Gambar 1.4 Kolaborasi Pengembangan Ubi Ungu sebagai Kosmetik



Sumber: <https://uns.ac.id/id/> (2022)

Adanya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata *The Lawu Fresh* diharapkan dapat menjadi suatu langkah strategi yang menjadikan obyek wisata *The Lawu Fresh* menjadi sebuah agrowisata yang memiliki ciri khas atau ikon pembeda dengan obyek wisata yang lainnya.

Sejatinya adanya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata *The Lawu Fresh* ini diharapkan dapat menjadi langkah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan dapat mengoptimalkan potensi pada kawasan tersebut. Perlu adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan kepariwisataan yang berlangsung pada kawasan tersebut. Kualitas sumber daya yang baik juga diharapkan dapat mendorong pengembangan dan pengelolaan obyek wisata secara maksimal, optimal, dan berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya sisi inovasi dan kreativitas berdampak pada obyek wisata *The Lawu Fresh* belum memiliki ciri khas dibanding obyek wisata yang lain dan promosi yang kurang menyebabkan jumlah wisatawan kurang maksimal.
- 2) Dalam bidang pengembangan UMKM, dari segi kualitas sumber daya manusia juga masih tergolong kurang dilihat sistem pemasaran masih secara konvensional dan belum optimalnya *brand awareness* masyarakat.
- 3) Luasnya lahan BUMDes tidak diiringi dengan pemanfaatan yang baik. Sebagian lahan tersebut telah dimanfaatkan sebagai lokasi *The Lawu Fresh* namun belum sepenuhnya optimal. Sebab belum adanya penataan secara terencana serta terintegrasi untuk memanfaatkan lahan. *Icon* atau penanda untuk menarik wisatawan yang juga masih belum tersedia.
- 4) Belum optimalnya pengembangan UMKM maupun sentra industri kreatif yang ada karena belum adanya kios oleh-oleh yang berisi produk makanan maupun kerajinan tangan masyarakat sekitar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata *The Lawu Fresh* di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar?

- 2) Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata *The Lawu Fresh* di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian digunakan agar penelitian dapat dilakukan secara terarah dan berguna sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata *The Lawu Fresh* di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata *The Lawu Fresh* di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian digunakan agar penelitian ini memberikan manfaat serta menjadi salah satu sumber referensi yang valid utamanya dalam menggambarkan sebab akibat dalam suatu fenomena dan memberikan nilai positif bagi penulis dan pembaca. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan maupun menambah wawasan dan menjadi referensi yang valid serta relevan untuk penelitian yang berikutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu khasanah keilmuan tambahan bagi Ilmu Administrasi Publik.

2) Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi penulis

Manfaat dari penelitian ini bagi penulis antara lain untuk mengembangkan serta mengimplementasikan materi belajar yang diperoleh pada saat perkuliahan berlangsung kemudian juga menambah ilmu maupun wawasan dengan melihat perbedaan ilmu teori dengan praktek di lapangan.

b. Manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar

Manfaat dari penelitian ini bagi pemerintah dan masyarakat Desa Puntukrejo adalah sebagai masukan atau referensi untuk mengoptimalkan obyek wisata *The Lawu Fresh* maupun potensi pariwisata yang ada di Desa Puntukrejo lewat kegiatan pemberdayaan masyarakat.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoretis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

(1) No.	(2) Peneliti	(3) Judul	(4) Jenis dan Teori	(5) Hasil Penelitian
1.	Leny Pramesti, Ummul Mustaqimah, Musyawaroh, dan Avi Marlina (2021)	Identifikasi Potensi dan Permasalahan di Lahan BUMDes Desa Puntukrejo Kabupaten Karanganyar	Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis SWOT	<ul style="list-style-type: none">• Lahan BUMDes memiliki potensi digunakan sebagai area rekreasi, kesenian, lahan pertanian, pengembangan UMKM, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.• Berbagai kegiatan utama yang mendukung penggunaan lahan BUMDes Puntukrejo, yaitu kegiatan refreshing, kegiatan wisata, dan kegiatan edukasi.
2.	Musyawaroh, T.J. Daryanto, dan U. Mustaqimah (2021)	Strategi Penataan Lahan BUMDes Puntukrejo Ngargoyoso Karanganyar Sebuah Konsep Agrowisata	Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis SWOT	<ul style="list-style-type: none">• Konsep agrowisata yang diterapkan untuk menata lahan meliputi <i>attractions, facilities, infrastructure, transportation</i> dan <i>hospitality</i>.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<ul style="list-style-type: none"> Aplikasinya pada perencanaan penzonningan pada lahan, dilengkapi dengan desain bangunan pendukungnya, yakni museum tani, JPO, zona penghubung, musholla, pasar, UMKM, & perluasan lahan parkir.
3.	Aldi Rizki Khoiruddin, Muhammad Ainurrasyid Al-Fikri, Aditya Tri Wijaya, dkk (2021)	Optimasi Pariwisata Kreatif Berbasis Integrasi Potensi Lokal Desa Puntukrejo untuk Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> Desa	Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode <i>Participatory Rural Appraisal</i> (PRA)	<ul style="list-style-type: none"> Naiknya skill masyarakat dalam memasarkan tempat wisata dan produk UMKM yang dimiliki desa melalui berbagai media sosial seperti Instagram, Tiktok, Facebook, dan juga Youtube. Kenaikan skill ini diikuti meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke tempat wisata desa, serta turut membeli produk-produk UMKM.
5.	Humaidi, Alif Hadi Saifulloh, A. Ridho Maulana, dkk (2022)	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Objek Wisata Telaga Madiredo	Jenis penelitian kualitatif deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan dilakukan melalui penanaman tanaman hias, pemindahan tanaman hias dan pohon buah dari polybag ke sekitar telaga Madiredo, pengurusan telaga untuk memudahkan pengecatan, dan pembuatan plang petunjuk arah ke objek wisata telaga Madiredo
6.	Pricilia Cherry Rontos, Johnny Hany Posumah, dan Novva N. Plangiten (2018)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Menunjang Sektor Pariwisata Bukit Kasih (Suatu Studi di Desa Kanonang Empat Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa)	Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teori pemberdayaan menurut Ginanjar Kartasmita	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan masyarakat Desa Kanonang Empat belum berjalan dilihat dari upaya menciptakan suasana yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dan melindungi masyarakat melalui pemihakan masyarakat lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Indriani dan Arwin Sanjaya (2022)	Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Desa Tetebatu Selatan Kabupaten Lombok Nusa Tenggara Barat	Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis SWOT	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan pariwisata menunjukkan Desa Tetebatu Selatan memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan lebih jauh. Pengembangan pariwisata juga sudah berjalan baik. • Hanya saja dari 7 aspek terdapat 2 aspek yaitu Aspek kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat dan aspek fasilitas pendukung pariwisata yang masih perlu ditingkatkan.
8.	Ummu Aliyah, Mohamad Hariyadi, dan Prihadi (2019)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wisata Mangrove Desa Banyu urip, Pangkah, Gresik	Jenis penelitian kualitatif deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan wisata Mangrove Banyu urip selama ini belum tergarap secara optimal. • Perlu peningkatan sarana prasarana hutan mangrove agar pengunjung bisa nyaman dan betah menikmati wisata ini.
9.	Agil Sugih Prayuda, Anggit Rinjani, Komala Fitriyanti, dkk (2019)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Situs Melandang di Desa Buah Dua Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang	Jenis penelitian kualitatif deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga strategi, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. • Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan inovasi Karang Taruna untuk menyadarkan masyarakat akan potensi Desa Buah Dua.
10.	Dicky Kurnia Ramadani, Ahmad Bustomi, dan M. Kholis Amrullah (2022)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wisata Air Terjun Kembang Soka di Dusun Gunungkelir Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo	Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode ABCD (<i>Asset, Based, Community and Development</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pemberdayaan masyarakat berupa proses realisasi dan proses pemberdayaan. • Hasil pemberdayaan adalah meningkatnya kepedulian, kemandirian dan pendapatan masyarakat, serta terbukanya lapangan pekerjaan.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	Baiq Nila Retna Sari (2020)	<i>The Community Empowerment in Tourism Development in Batu City</i>	Jenis penelitian kualitatif deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Batu telah dilaksanakan dengan baik. • Faktor pendukungnya antara lain dana desa difokuskan tidak hanya pada infrastruktur tetapi juga masyarakat serta peran pemimpin yang baik dan mendukung melalui arah kebijakan.
12.	Ruwan Ranasinghe dan Jayathree Pradeepamali (2019)	<i>Community Empowerment and their Support for Tourism Development: an Inquiry based on Resident Empowerment through Tourism Scale</i>	Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teori pertukaran sosial dan teori rasionalitas	<ul style="list-style-type: none"> • Teori pertukaran sosial tidak cukup menjelaskan perilaku penduduk terhadap pariwisata. Teori Weber rasionalitas formal dan substantif muncul sebagai pendekatan yang lebih luas. Praktisi wisata membutuhkan perhatian pada pertimbangan non ekonomi seperti nilai, kepercayaan, dan moral dalam mengadvokasi dukungan penduduk.

Hasil kajian penelitian terdahulu di atas memuat kegiatan menganalisis pemberdayaan masyarakat menggunakan berbagai macam pendekatan, teori, dan indikator. Analisis terkait pemberdayaan masyarakat sebagian besar menggunakan pendekatan pemberdayaan dengan teori dan pendapat ahli yang beragam, sehingga dalam menganalisis proses pemberdayaan terdapat indikator dan fenomena yang berbeda-beda. Terdapat juga penggunaan teori lain seperti teori pertukaran sosial dan teori rasionalitas. Metode penelitian yang digunakan sebagian besar sama, yakni dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

terdahulu di atas seperti pada penelitian oleh Agil S.P, dkk (2019) adalah berfokus menganalisis proses pemberdayaan masyarakat. Selain itu terdapat persamaan lain yakni dengan metode yang sama yaitu metode kualitatif deskriptif, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus menganalisis proses pemberdayaan dalam pengembangan obyek wisata *The Lawu Fresh* sekaligus menganalisis faktor yang mendukung dan yang menghambat pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata *The Lawu Fresh*.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, teori yang dipilih peneliti guna menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata *The Lawu Fresh* adalah teori pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto yang melihat proses pemberdayaan memiliki tiga tahapan yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Peneliti juga menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dengan menganalisis dimensi keberhasilan pemberdayaan menurut UNICEF, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi akses, dimensi kesadaran kritis, dimensi partisipasi, dan dimensi kontrol. Pemilihan teori dan metode penelitian tersebut karena relevan digunakan untuk menganalisis proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata *The Lawu Fresh* sebagai suatu fenomena yang kemudian hasilnya diuraikan dan dianalisis.

1.6.2 Kerangka Pemikiran

1.6.2.1 Administrasi Publik

Administrasi Publik menjadi salah satu bidang yang terus mengikuti perkembangan zaman hingga saat ini. Saat ini Administrasi Publik juga tidak

asing lagi ditelinga masyarakat. Menurut Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2011:7) mengungkapkan bahwa Administrasi Publik menjadi salah satu kelimuan atau seni yang berfungsi untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan. Sebagai salah satu disiplin ilmu, Administrasi Publik juga bertujuan untuk memberikan pemecahan berbagai permasalahan masyarakat dengan memberikan perbaikan seperti pada bagian organisasi, bagian sumber daya manusia (SDM), maupun bagian keuangan. Administrasi Publik juga menjadi salah satu bidang yang mengkaji berbagai permasalahan mengenai manajemen publik maupun kebijakan publik.

Perkembangan keilmuan ini kian tumbuh dan berkembang dan dikenal dengan beberapa paradigma yang menjelaskan perubahan-perubahan maupun perbedaan mengenai tujuan, teoretis, dan metode atau pada sisi epistemologi dan nilai dasar. Salah satunya perkembangan tersebut adalah administrasi publik yang ditafsirkan sebagai suatu manajemen yang dikemukakan oleh L.F. Keller (dalam Keban, 2014). Menurutnya administrasi publik didefinisikan sebagai suatu sistem manajemen untuk administrasi Publik yang lebih kompleks yang mana administrasi publik menjadi suatu manajemen dalam ekspansi teknologi modern dengan arah pada modern *governance*. Pengertian tersebut menjadi hasil dari reformasi administrasi publik yakni *New Public Management* atau dikenal sebagai NPM. Baru-baru ini C.T. Goodsell (dalam Keban, 2004) mendefinisikan administrasi publik sebagai upaya untuk menuju tata kelola pemerintah yang dapat terintegrasi (*integrated public governance*)

yang mana seluruh pihak yang terlibat sebagai pelaksana pelayanan publik telah terintegrasi berdasar pada nilai-nilai keadilan, efisiensi, hukum, keteladanan, transparansi, dan integritas untuk menuju tercapainya kehidupan yang demokratis dan masyarakat yang percaya kepada organisasi publik.

Penelitian ini menggunakan paradigma *governance* yang menjadi salah satu paradigma dalam keilmuan administrasi publik. Sedarmayanti (2003) memaparkan bahwa *good governance* diartikan sebagai rangkaian proses penyelenggaraan negara dalam menyediakan *public goods and service* atau disebut sebagai *governance* (pemerintah atau pemerintahan), kemudian untuk praktek terbaiknya dinamakan sebagai *good governance* atau pemerintahan yang baik. *Good governance* saat ini menjadi tujuan yang pemerintah hendak capai untuk menciptakan penyelenggaraan yang terbaik. Perkembangan teori administrasi publik memberi implikasi pada pelaksanaan peranan administrasi publik yang menggunakan pendekatan yang diambil pembuat dan pengimplementasi strategi, pengaturan organisasi internal dan korelasi antara badan publik dengan pelaku politik, masyarakat, maupun pihak yang lain. *Governance* tersebut memberi penekanan pada aksi bersama setiap aktor saling berhubungan dan memiliki timbal balik dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Paradigma *good governance* berkaitan dengan penelitian ini karena setiap pihak pada penelitian ini saling berhubungan dan memiliki timbal balik dalam mengatur, mengelola, dan mengembangkan obyek wisata *The Lawu Fresh* dan terlibat dalam manajemen dan pemeliharaan obyek wisata *The Lawu Fresh* agar berkelanjutan dan bermanfaat secara adil.

1.6.2.2 Manajemen Publik

Samuel E. Overman (dalam Keban, 2014) mengemukakan manajemen publik adalah sebuah studi interdisipliner yang menghimpun aspek umum organisasi dan gabungan dari fungsi manajemen yang terdiri atas *planning*, *organizing*, dan *controlling* di satu sisi, dengan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain. Pada dasarnya manajemen publik diartikan sebagai serangkaian proses yang menggerakkan sumber daya sesuai dengan kebijakan-kebijakan publik. Manajemen publik juga berhubungan pada fungsi maupun proses manajemen yang ada dalam sektor publik atau pemerintahan dan di luar dari sektor pemerintahan yang memiliki tujuan tidak mencari keuntungan semata atau sektor non-profit.

Menurut J. Steven Ott, Albert C Hyde, dan Jay M Shafritz (dalam Pasolong, 2011) mengungkapkan bahwa manajemen publik berfokus pada prosesi dan memfokuskan manajer publik sebagai praktisi atas profesi tersebut. Dilihat dari pendapat ketiganya, manajemen publik pada dasarnya lebih ke arah mencurahkan perhatian pada operasi maupun pelaksanaan internal organisasi pemerintah atau sektor non-profit dibandingkan dengan hubungan atau proses interaksi bersama lembaga legislatif, peradilan, ataupun organisasi publik yang lain.

Menurut Woodrow Wilson (dalam Nawawi, 2013) terdapat empat prinsip-prinsip dasar dari kelimuan Administrasi Publik yang mewarnai manajemen publik. Keempat prinsip dasar tersebut adalah:

- a. Pemerintah menjadi setting utama dari organisasi

- b. Fungsi eksekutif menjadi fokus utama
- c. Pencarian prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci dari pengembangan kompetensi administrasi
- d. Metode perbandingan menjadi suatu metode studi dan pengembangan dalam keilmuan Administrasi Publik.

1.6.2.3 Pemberdayaan Masyarakat

a.) Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang mengandung artian tenaga, upaya, dan kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, pemberdayaan yang berasal dari bahasa Inggris “*empower*” memiliki dua pengertian. Pertama adalah *to give power or authority to* atau memberikan suatu kekuasaan, mengalihkan kekuatan, maupun melakukan delegasi otoritas kepada pihak yang lain. Kedua adalah *to give ability to or enable* atau suatu upaya untuk memberikan kemampuan maupun keberdayaan (dalam Sherly, 2021).

Sumaryadi (2005:114) mengemukakan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan harkat lapisan dari masyarakat maupun pribadi masyarakat itu sendiri. Upaya-upaya tersebut meliputi:

- 1) Memberikan dorongan, motivasi, hingga mendorong peningkatan kesadaran akan potensi dan menghadirkan suatu iklim atau suasana untuk berkembang;

- 2) Memberikan kekuatan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan atau langkah positif pengembangan;
- 3) Penyediaan masukan termasuk dalam hal pembukaan akses atas peluang dan potensi yang ditemukan.

Pemberdayaan menjadi suatu “proses yang menjadi”, bukan sebagai “proses yang instan”. Bisa diartikan bahwa pemberdayaan ini menjadi tahap yang berlangsung secara menyeluruh dan aktif dan berlangsung dari sisi motivator, fasilitator, dan masyarakat yang perlu diberdayakan lewat kegiatan peningkatan wawasan dan keilmuan, ketrampilan, hingga pemberian kemudahan, termasuk peluang untuk memperoleh akses atas sistem sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan menjadi kegiatan untuk memberi daya pada masyarakat.

b.) Tujuan dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang hendak dicapai dari pemberdayaan adalah memberikan kekuatan masyarakat, utamanya bagi masyarakat yang lemah dan tidak berdaya dari sisi internal yang berasal dari pemikiran mereka sendiri atau sisi eksternal yang mana muncul sebab adanya penindasan oleh struktur sosial yang tidak memberikan keadilan sehingga perlu diketahui bagaimana ciri dari kelompok lemah dan penyebab tidak berdaya yang masyarakat alami untuk melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan. Kelompok masyarakat lemah dan tidak berdaya tersebut dikategorikan melalui hal berikut:

- 1) Masyarakat yang lemah segi struktural, kelompok ini lemah secara kelas di masyarakat (kelas sosial ekonomi yang rendah), gender, ataupun etnis (minoritas), dan mereka yang mendapat diskriminasi di masyarakat.
- 2) Masyarakat yang lemah secara khusus, kelompok ini terdiri atas manusia lanjut usia, anak-anak, remaja, penyandang disabilitas, kelompok LGBT, hingga masyarakat yang terasing.
- 3) Masyarakat yang lemah secara personal, pada kelompok ini terdiri atas masyarakat yang mendapatkan permasalahan personal maupun permasalahan keluarga (Suharto, 2007:60).

c.) Strategi / Cara Pemberdayaan Masyarakat

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:2) mengemukakan langkah pemberdayaan menjadi sebuah rangkaian proses menjadi bukan proses yang berlangsung secara instan. Pada proses tersebut, pemberdayaan terdiri atas tiga tahap yang terdiri atas:

1) Tahap penyadaran

Pada tahap ini, sasaran yang diberdayakan diberikan pencerahan dengan bentuk penyadaran bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai sesuatu. Misalnya bagi masyarakat miskin maka mereka diberikan pemahaman dan wawasan bahwa mereka bisa meningkat menjadi kaum menengah ke atas apabila mereka memiliki dan meningkatkan kapasitas untuk keluar dari ketidakberdayaannya. Dalam hal itu, tahap

penyadaran dapat dilakukan dengan memberikan wawasan dan ilmu yang bersifat *kognitif*, *belief*, dan *healing*. Dengan begitu, sasaran pemberdayaan dapat sadar serta paham bahwa mereka butuh untuk diberdayakan.

Tahap penyadaran dilakukan dengan melalui pemberian penyuluhan ataupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat dimulai dari rekrutmen peserta dan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi serangkaian proses yang penting dalam tahap penyadaran.

2) Tahap pengkapasitasan (*capacity building*)

Pada tahap ini juga disebut sebagai memampukan atau *enabling*. Sasaran pemberdayaan hendaknya dapat lebih mampu dahulu sebelum yang bersangkutan diberikan daya atau kuasa. Jadi pada dasarnya pihak sasaran diberikan terlebih dahulu program kemampuan untuk mendorong mereka agar memiliki keahlian maupun ketrampilan sehingga mereka bisa mengelola sesuatu setelah menerima daya atau kuasa tersebut.

Rangkaian proses tersebut terdiri dari tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, serta sistem nilai seperti memberikan pelatihan ketrampilan, pendampingan, hingga seminar. Tahap pengkapasitasan ini terdiri dari pelatihan ketrampilan ke masyarakat atau komunitas dari pemberian materi dan kendala yang dihadapi selama pelatihan berlangsung.

3) Tahap pendayaan

Tahap pendayaan ini dilakukan dengan memberi daya, kekuasaan, wewenang, peluang, hingga kesempatan kepada sasaran. Pemberian daya hendaknya disesuaikan dengan kualitas dan kemampuan yang ada dalam diri sasaran pemberdayaan sebab hakikatnya memang pemberian daya ini disesuaikan atas kemampuan sasaran pemberdayaan. Langkah ini menjadi tahapan terakhir dalam proses pemberdayaan. Tahap pendayaan ini terdiri atas keterlibatan masyarakat yang dilihat dari hasil pemberdayaan masyarakat, motivasi masyarakat dari ikutserta mereka untuk lebih berkembang, dan proses evaluasi yang dilakukan masyarakat.

d.) Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pada umumnya pendekatan utamanya adalah mereka yang tidak menjadi obyek atas proyek pembangunan, namun masyarakat menjadi subyek dari proses pembangunan tersebut. Berangkat dari konsep itu, pemberdayaan masyarakat hendaknya mengikuti pendekatan yang dipaparkan di bawah ini:

1) Proses upaya hendaknya dilakukan sesuai arah atau *targetted*.

Hal ini disebut juga sebagai pemihakan yang menunjuk secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan program yang telah dirancang untuk mengatasi masalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

- 2) Program tersebut hendaknya mengikutsertakan masyarakat secara langsung atau dilaksanakan masyarakat yang menjadi sasarannya. Pengikutsertaan masyarakat tersebut bertujuan agar bantuan yang diberikan dapat berlangsung secara efektif dan sesuai kehendak, kemampuan, dan dari kebutuhan masyarakat sendiri. Langkah lain untuk mendorong keberdayaan atau *empowering* salah satunya meningkatkan pengalaman dalam melakukan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan setiap proses peningkatan wawasan dan aspek ekonomi mereka.
- 3) Menggusung pendekatan kelompok, sebab apabila dilakukan secara individu maka pihak yang kurang mampu akan sulit dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. Selain itu dari sisi bantuan juga kian meluas apabila penanganan berlangsung per individu. Pendekatan kelompok ini cenderung dinilai lebih efektif efisien.

e.) Dimensi Keberhasilan Pemberdayaan

Menurut UNICEF (dalam Gunawan, 2020) ada lima dimensi keberhasilan yang menjadi ukuran untuk menilai suatu keberhasilan atau efektif tidaknya suatu pemberdayaan.

1) Dimensi kesejahteraan

Dilihat dari tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan sandang, papan, pangan, pendapatan, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan.

2) Dimensi akses

Dimensi ini berkaitan dengan kesetaraan untuk mendapatkan akses atas setiap sumber daya yang ada dan memperoleh manfaat dari kegiatan pemberdayaan tersebut. Tidak adanya akses akan membuat kegiatan menjadi tidak dapat berlangsung. Akibat yang ditimbulkan dari tidak adanya akses salah satunya adalah adanya kesenjangan yang terjadi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya.

3) Dimensi kesadaran kritis

Dimensi kesadaran kritis ini dilihat dari kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan yang ada dapat diubah salah satunya diubah melalui program pemberdayaan.

4) Dimensi partisipasi

Partisipasi atau partisipasi segenap masyarakat pada kegiatan yang ada dilihat dari adanya peranserta dari masyarakat dalam pengambilan keputusan yang ada.

5) Dimensi kontrol

Dimensi kontrol dapat dilihat dari masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengontrol pendayagunaan yang ada sehingga mereka turut serta dalam memegang kendali atas sumber daya yang ada. Tidak hanya kelompok tertentu saja yang menguasai sumber daya tersebut, namun seluruh lapisan masyarakat mampu mengendalikan sumber daya yang ada.

1.6.3 Operasionalisasi Konsep

Pemberdayaan masyarakat menjadi langkah untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat supaya dapat dikembangkan dan memberikan manfaat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan mendorong perekonomian masyarakat sehingga mereka tidak bergantung pada pemerintah. Pemerintah yang memberikan fasilitas juga memiliki tugas untuk pembinaan dan mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Pada proses pemberdayaan, masyarakat menjadi pihak yang diberikan keberdayaan dan pemerintah menjadi pihak yang memberikan pendayaaan.

Operasionalisasi konsep dilakukan untuk menerangkan secara bentuk nyata atas kerangka teoretis, sebab dalam teoretis masih bersifat abstrak dan belum sepenuhnya diukur pada proses turun lapangan. Untuk itu dioperasionalkan supaya dapat berlangsung secara terarah. Adapun berikut ini operasionalisasi konsep yang digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tahap atau proses Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Obyek Wisata *The Lawu Fresh* di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar:

1) Tahap penyadaran

Pada tahapan ini sasaran yang diberdayakan diberikan pencerahan dengan bentuk penyadaran bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai sesuatu. Tahap penyadaran dilakukan dengan melalui penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat. Tahap ini dapat dilihat melalui indikator:

- a) Rekrutmen masyarakat yang menjadi sasaran penyadaran.
- b) Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.

2) Tahap pengkapasitasan (*capacity building*)

Pada tahap ini juga disebut sebagai pemberian kemampuan atau *enabling*. Proses memampukan sasaran ini terdiri dari tiga jenis yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai seperti memberikan pelatihan ketrampilan, pendampingan, *workshop*, maupun rangkaian seminar. Tahap pengkapasitasan dapat dilihat melalui indikator:

- a) Pelatihan ketrampilan masyarakat
- b) Kendala yang dihadapi selama pelatihan berlangsung.

3) Tahap pendayaan

Tahap pendayaan ditempuh dengan memberikan daya, wewenang, peluang, atau kesempatan pada masyarakat yang menjadi sasaran. Tahap pendayaan ini dapat dilihat melalui indikator:

- a) Hasil dari pemberdayaan masyarakat.
- b) Motivasi masyarakat untuk lebih berkembang.
- c) Proses evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Adapun untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata *The Lawu Fresh* di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso dapat menggunakan dimensi keberhasilan pemberdayaan berikut:

1) Dimensi kesejahteraan

Dimensi ini memberikan gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu dan dapat dilihat dengan melalui indikator:

a) Tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat baik dari kebutuhan sandang, papan, pangan, dan pendidikan.

2) Dimensi Akses

Dimensi ini berkaitan dengan kesetaraan untuk memperoleh akses atas sumber daya ada dan kesetaraan untuk memperoleh kemanfaatan yang diberikan dari proses pemberdayaan. Dimensi ini dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut:

- a) Fasilitas yang tersedia untuk menjalankan program pemberdayaan.
- b) Tersedianya waktu dan tenaga masyarakat untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan.

3) Dimensi kesadaran kritis

Dimensi ini berkaitan dengan peningkatan kesadaran masyarakat Desa Puntukrejo bahwa kesenjangan yang ditemukan menjadi masalah sosial yang harus diberikan solusi. Dimensi kesadaran kritis ini dapat dilihat dari indikator yang ada di bawah ini:

- a) Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan potensi kepariwisataan
- b) Konsistensi dari masyarakat dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat

4) Dimensi partisipasi

Dimensi ini dilihat dari peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kepentingan organisasi, proses pembangunan dan pengembangan, serta partisipasi masyarakat

dalam kegiatan pemberdayaan. Dimensi partisipasi ini dapat dilihat melalui beberapa indikator di bawah ini:

- a) Meningkatnya peran masyarakat dalam pemberian gagasan atau ide yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata.
- b) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi yang berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan.

5) Dimensi kontrol

Dimensi ini berkaitan dengan peranserta masyarakat Desa Puntukrejo dalam mengontrol pengelolaan sumber daya yang ada pada desa tersebut. Dimensi kontrol dapat dilihat melalui indikator berikut:

- a) Meningkatnya kemampuan dan kesempatan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki.
- b) Terwujudnya rasa keadilan dan kesempatan yang sama dari masyarakat untuk mengelola dan menikmati sumber daya.

1.7 Argumentasi Penelitian

Penelitian ini berangkat dari rasa keingintahuan dari penulis tentang permasalahan yang ada dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata *The Lawu Fresh* di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Sebagai salah satu desa di Kecamatan Ngargoyoso, Desa Puntukrejo menjadi salah satu desa dengan potensi pariwisata yang beragam. Kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat faktor yang menyebabkan proses pemberdayaan kurang berjalan dengan optimal. Hal ini yang membawa keinginan peneliti untuk mengetahui “faktor apa yang menyebabkan

proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata *The Lawu Fresh* di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar belum berjalan dengan baik?”.

Peneliti juga berupaya untuk menganalisa dan mengidentifikasi proses pemberdayaan yang berjalan dalam pengembangan obyek wisata beserta faktor yang mendukung dan menghambat proses pemberdayaan tersebut. Peneliti berharap melalui penelitian ini dapat menambah khasanah wawasan masyarakat Desa Puntukrejo utamanya dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata *The Lawu Fresh*.

1.8 Metode Penelitian

Bungin (2003) memaparkan metode pengumpulan data merupakan dengan cara apa dan bagaimana data yang dibutuhkan bisa diperoleh dan disatukan sehingga dalam hasil dari penelitian dapat menyajikan berbagai informasi yang valid serta *reliable*. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata *The Lawu Fresh* di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Termasuk pada faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata *The Lawu Fresh*.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai merupakan tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memberikan berbagai gambaran atas suatu fenomena atau subyek yang ada di dalam penelitian.

1.8.2 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi Penelitian menjadi tempat bagi peneliti untuk mendapatkan informasi dan berbagai data dari masalah pada penelitian. Melalui penetapan lokasi ini maka objek dan tujuan penelitian tentunya sudah ditentukan. Di penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Situs penelitian menjadi tempat bagi peneliti untuk melihat kejadian yang benar-benar terjadi pada sebuah objek untuk mendapatkan berbagai data dan informasi. Berdasarkan pada latar belakang sebelumnya maka peneliti menetapkan situs penelitian pada obyek wisata *The Lawu Fresh* yang berada di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber yang dimintai informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Adapun maksud dari sumber data didalam penelitian merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh (Arikunto, 2019). Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini didasarkan atas teknik *purposive sampling*. Menurut Helaluddin dan Wijaya (2018) teknik *purposive sampling* merupakan sebuah teknik pengambilan sampel sumber data melalui pertimbangan beberapa hal, seperti partisipan yang dianggap memiliki pengetahuan yang lebih dan memahami apa yang disampaikan. Partisipan tersebut diseleksi secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Berikut adalah beberapa subyek yang ada dalam penelitian ini:

1. Pemerintah Desa Puntukrejo
2. Pengelola Obyek Wisata *The Lawu Fresh*

3. Masyarakat Desa Puntukrejo
 - a) Komunitas Jeep Wisata Puntukrejo (KJP)
 - b) Komunitas *Outbound* PENA

1.8.4 Jenis Data

Jenis data pada didalam penelitian peneliti merupakan jenis data berupa teks maupun kata kata tertulis. Pada alternatif lain, memungkinkan adanya penggunaan tabel atau bagan pendukung lainnya.

1.8.5 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2007) sumber data utama penelitian pada jenis kualitatif adalah kata tertulis, tindakan, maupun data lainnya berupa dokument ataupun data yang lain. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti merupakan data primer dan data sekunder. Penjelasan mengenai data primer dan data sekunder yang diperoleh oleh peneliti akan dijabarkan sebagai berikut ini:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang berkaitan secara langsung atas permasalahan yang ada. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007) prosedur penelitian berjenis kualitatif akan menghasilkan data deskriptif seperti ucapan, tulisan, maupun tingkah laku orang. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, data primer ialah data-data yang didapatkan secara langsung di lokasi penelitian yang berhubungan secara langsung atas obyek yang tengah diteliti. Sumber data primer pada penelitian berikut dihasilkan lewat hasil wawancara dan dokumentasi.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang tidak didapatkan secara langsung yang umumnya didapat melalui studi pustaka dengan media bacaan dan internet untuk mendukung pembahasan. Sumber data sekunder yang dapat digunakan untuk mendukung data primer antara lain studi pustaka, studi dokumen, buku bacaan, majalah, surat kabar, hingga arsip tulisan yang berkaitan atas obyek yang tengah diteliti selama penelitian.

Sugiyono (2015) mengungkapkan bahwa sumber data sekunder sendiri diperoleh secara tidak langsung didapat oleh penulis. Sumber data sekunder sendiri digunakan untuk membantu proses analisis hasil penelitian sehingga bisa memperkuat atas temuan maupun hasil penelitian dengan begitu sisi validitas dari penelitiannya akan semakin tinggi.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti memakai teknik pengumpulan data berupa wawancara serta dokumentasi. Langkah ini dilakukan agar memperoleh informasi dan berbagai data penelitian yang valid dan akurat. Berikut penjelasan dari teknik pengumpulan data tersebut:

1) Teknik Wawancara

Wawancara ialah rangkaian percakapan yang terdiri dari dua pihak, yakni pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan tersebut (Moleong, 2007). Wawancara menjadi pengumpulan data yang dipakai untuk memperoleh keterangan yang diulik secara langsung lewat percakapan bersama maupun proses tanya jawab.

Wawancara pada jenis penelitian kualitatif memiliki sifat yang mendalam agar informasi yang diperoleh dapat akurat dan jelas. Teknik wawancara sendiri bisa dilakukan dengan melalui tatap muka secara langsung atau (*face to face*) ataupun tidak langsung dengan perantara, yakni telepon kepada narasumber terkait. Wawancara yang peneliti gunakan merupakan jenis wawancara terstruktur dimana pertanyaan disusun secara terperinci.

2) Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik berupa pencarian dokumen berbentuk publikasi resmi, catatan, transkrip, buku bacaan, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dll. Teknik dokumentasi dipakai sebagai langkah melengkapi informasi dan keterangan yang telah diperoleh. Dokumentasi tersebut dapat berupa foto, gambar, arsip yang diperoleh selama penelitian sedang berlangsung.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015), terdapat tiga teknik yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Ketiga teknik tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini biasanya berlangsung selama penelitian bahkan sebelum memperoleh data penelitian.

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data menjadi salah satu teknik dari analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan sebuah rangkaian analisis dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, atau menghapus data yang tidak diperlukan dan menyatukan data sehingga diperoleh kesimpulan final.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan serangkaian proses di mana berbagai keterangan atau data kemudian disusun dengan terpadu sehingga memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan penelitian. Contoh penyajian data kualitatif sendiri dapat berbentuk teks naratif (catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, hingga bagan.

c) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis peneliti yang kemudian dapat digunakan untuk mengambil sebuah tindakan. Kesimpulan awal yang dikemukakan biasanya masih sementara dan mengalami perubahan seiring dengan ditemukannya bukti yang mendukung tahapan berikutnya. Namun ada catatan bila kesimpulan awal tersebut sudah didukung sumber bukti yang valid serta konsisten pada saat peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data maka dapat dikatakan kesimpulan tersebut bersifat kredibel. Untuk memperoleh kesimpulan yang kredibel, peneliti perlu mendalami proses analisis data dengan baik.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas penelitian peneliti diuji melalui teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan sebuah pendekatan analisa data dengan mensintesa data dari berbagai sumber. Triangulasi menurut Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2015) adalah *“the aim is not to determinate the truth about same social phenomenon, rather than the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of what ever is being investigated”*. Dengan begitu, triangulasi dapat dikatakan bukan untuk

pencarian kebenaran, namun meningkatkan wawasan dan pemahaman peneliti mengenai keterangan dan fakta yang telah diperoleh. Triangulasi ialah sebuah langkah memperoleh data yang teruji keabsahannya melalui pendekatan metode ganda. Triangulasi juga diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan data yang telah diperoleh.

Triangulasi yang dipakai peneliti adalah Triangulasi Sumber. Triangulasi pada metode ini ditempuh dengan memberikan perbandingan dan mengecek ulang derajat kepercayaan dari keterangan yang diperoleh dengan berbagai sumber lain. Misalnya dengan memberikan perbandingan pada hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Untuk mencapai kepercayaan tersebut, dilakukan beberapa langkah sebagai berikut ini:

- a. Memberikan perbandingan atas apa yang dikatakan orang lain di depan umum dengan apa yang disampaikan oleh pihak tersebut secara pribadi.
- b. Memberikan perbandingan atas apa yang dikatakan orang lain mengenai situasi penelitian dengan apa yang disampaikannya sepanjang waktu.
- c. Memberikan perbandingan dari hasil wawancara dengan berbagai dokumen yang dinilai memiliki keterkaitan.